



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA BALI

I Ketut Suastika, Agus Joko Purwanto, Ade Reza Hariyadi*

Program Pascasarjana, Universitas Terbuka, Indonesia

Correspondence: *E-mail: suastika77@gmail.com

ABSTRACTS

This research aims to determine the Implementation of Police Education System Policy at the Bali Police National Police SPN in the Implementation of Education for the Formation of Bintara Polri in 2021. Policy implementation analysis uses the theory of George C. Edward III, using four variables, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research used the qualitative descriptive, with the source informant head of SPN, PJU, Gadik and Pengasuh in the SPN environment of Bali Police. The role of communication is carried out from top to bottom, sideways and down to the top with good implementation. The role of human resources, budgets, equipment, and authorities in accordance with the directives (directions) carried out responsibly. The role of disposition can be seen from the implementation of SOP by SPN Polda Bali and through (warrant) signed above to be carried out in accordance with the responsibilities of all personnel. This bureaucratic structure can be seen from the readiness of the implementation of work exercises held in polres/polsek. The implementation of education at SPN Polda Bali is good and adequate but there needs to be increased certification for gadik and caregivers and needs to be coordinated location mapping early so that the implementation of work exercises runs well and systematically.

Keyword: Education Police, Police Officer, Policy Education, System Education.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 14 Dec 2021

First Revised 29 Dec 2021

Accepted 25 Aug 2022

First Available online 02 Sep 2022

Publication Date 01 Oct 2022

1. PENDAHULUAN

Pada penelitian ini penulis ingin memfokuskan pada Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Bintara Polri di SPN Polda Bali melalui Pendekatan Model Edwards III. SPN sebagai lembaga pendidikan bagi Bintara Polri adalah tempat terpenting dari roda organisasi Polri karena di SPN merupakan basis bagi ribuan Bintara Polri dicetak sebagai pelaksana tugas kepolisian di lapangan nantinya. Hasil didik SPN merupakan tenaga pelaksana Polri di lapangan dan kinerja mereka di lapangan menentukan baik buruknya citra Polri di masyarakat kedepannya. Perkap Nomor 14 Tahun 2015 menjelaskan seluruh sistem pendidikan Polri termasuk bagaimana kebijakan diktuk bintara polri. Bintara Polri yang dibentuk oleh SPN Polda Bali dengan waktu pendidikan yang cukup singkat harus mampu menjadi sumber daya manusia yang siap pakai, mumpuni, profesional dan mampu menjawab tantangan zaman. Untuk itu diperlukan suatu analisis terhadap implementasi kebijakan terhadap Perkap Nomor 14 Tahun 2015 di lembaga pendidikan SPN Polda Bali, karena kebutuhan lulusan Diktuk Bintara Polri harus mempunyai kemampuan yaitu (1) mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik sebagai pelaksana utama tugas di lingkungan Polri, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung; (2) memiliki pengetahuan operasional Polri yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai; (3) mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan (4) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Dikutip dari [Sudrajat \(2014\)](#) kebijakan publik secara hierarki terbagi dalam tiga tingkat yaitu *policy level*, *organizational level*, dan *operational level*. *Policy level* adalah tingkat kebijakan publik dimana pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan pada tingkatan ini (*institutional arrangements*) adalah kebijakan nasional berupa perundang-undangan (Undang-Undang) dan kelembagaan tinggi negara. *Organizational level* merupakan tingkat tingkat kedua kebijakan publik setelah *policy level*. Kebijakan yang diformulasikan oleh lembaga eksekutif berupa *institutional arrangements* teknis seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri, program pembangunan atau pemerintah dan ketetapan pembiayaan program tersebut. *Operational level* merupakan tingkat kebijakan yang personilnya melakukan implementasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh *policy level* dan *organizational level* seperti rumah tangga dan perusahaan. Evaluasi kebijakan dilakukan pada tiap tingkat kebijakan melalui perumusan masalah pada peraturan perundang-undangan terkait (*institutional arrangements*) dengan konsistensi dan koherensi antar kebijakan tersebut.

Dalam siklus kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah tahapan yang sangat penting. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn ([Sudrajat, 2014](#)), George Edward III

(Roring, 2021), Grindle (Tisngati et al., 2016) dan Masmanian dan Sabatier (Rahawarin, 2019). Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis dengan lebih melakukan retrospeksi daripada prospeksi dengan tujuan ganda, yaitu: pertama memberi informasi bagaimana program-program tersebut dapat terlaksana, kedua menunjukkan faktor-faktor yang dapat diubah agar diperoleh capaian hasil yang lebih baik yang dapat memberikan perubahan implementasi atau program baru. Sebagaimana yang dikutip dari Winantasari dan Rahaju (2019), bahwa “Proses implementasi memiliki variabel atau faktor yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan capaian (*performance*). Variabel tersebut merupakan variabel bebas dan variabel terikat yang saling berhubungan satu sama lainnya”.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa capaian kebijakan dipengaruhi adanya beberapa variabel, variabel-variabel tersebut ditunjukkan pada beberapa model Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi kebijakan dipengaruhi adanya komunikasi, sumber-sumber (sumber daya), kecenderungan/sikap dan struktur birokrasi, standard dan sasaran kebijakan serta kondisi sosial ekonomi dan politik (Kurniawan dan Maani, 2019). Model Implementasi kebijakan menurut George Edward III, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi (Roring, 2021).

Spesifik Van Meter dan Van Horn lebih menekankan kepada kinerja kebijakan. Penerapan model implementasi merupakan tahapan pelaksanaan oleh pembuatan kebijakan dan masyarakat yang dipengaruhinya sesuai dengan tujuan, jika implementasi yang diterapkan tidak tepat maka tidak akan mengurangi permasalahan bahkan mengalami kegagalan. Selanjutnya dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menganggap faktor komunikasi akan berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi terkait serta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan dalam lingkungan sistem politik dengan kelompok-kelompok sasaran (Akib, 2010). Model implementasi kebijakan Van Meter mengharapkan semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka, organisasi atasan mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana, karena dalam implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi keberhasilan suatu program. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana Untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, mengemukakan bahwa kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan (Winantasari dan Rahaju, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu menambah studi literatur penelitian yang berkaitan dengan bagaimana implementasi pendidikan bintanga Polri di lihat dari kebijakan George Edward III. Dikutip dari Blumberg (2019) menemukan bahwa berbagai tingkat pendidikan dan pengalaman membentuk kekuatan fisik dan komunikasi verbal yang diperoleh dari pendidikan pembentukan. Anwar (2017) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Kebijakan tentang Diktuk Bintang POLRI yang diterapkan oleh SPN mengacu pada kebijakan Kapolri tentang Sistem Pendidikan POLRI. Penelitian dari Noor dan Sulistiyo (2016) mengemukakan bahwa implementasi george edward III dapat diterapkan dengan baik dalam peningkatan struktur birokrasi dalam pendayagunaan aparatur SDM kepolisian. Penelitian dari Winantasari dan Rahaju (2019) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melalui George Edward III berjalan cukup baik dalam implementasi kebijakan program SIM di Polri.

Dari beberapa penelitian diatas, meyakinkan peneliti bahwa model kebijakan George Edward III (Roring, 2021) melalui faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi dapat diterapkan dalam menganalisis kebijakan-kebijakan Polri.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, dengan teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi yang mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional. Subjek penelitian ini adalah siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2020/2021 yang merupakan informan utama. Sebagai triangulasi, peneliti mencari informasi pendukung melalui Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Bali, PJU Sekolah Polisi Negara Polda Bali, Gadik SPN Polda Bali, pengasuh dan siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Mutu

Fakultas Implementasi Penyelenggaraan Diktukba di SPN Polda Bali terlaksana dengan baik sesuai dengan teori Edward III yang terdiri dari 4 faktor yaitu *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispositions* (disposisi), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan Polri lainnya yang berpedoman pada teori Edward III, salah satunya adalah penelitian dari Achmad (2016) yang berfokus pada Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resor yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan perizinan dan kegiatan pemberitahuan masyarakat dilaksanakan dengan (a) Memberikan tanda terima pemberitahuan (b) Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di masyarakat (c) Berkoordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi sasaran penyampaian pendapat (d) Menyiapkan pengamanan lokasi dan jalur yang dilalui. (e) bertanggung jawab melindungi peserta penyampaian pendapat umum (f) bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan dan faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perizinan dan pemberitahuan masyarakat kegiatannya adalah: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya (3) Disposisi; dan (4) Struktur Organisasi. Penelitian lainnya yang mendukung implementasi kebijakan dalam organisasi kepolisian adalah dari Wardana (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui 4 tahap teori Edward III dapat dilaksanakan dengan baik.

Peran Komunikasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Diktukba

Peran komunikasi implementasi kebijakan penyelenggaraan diktukba berjalan lancar, khususnya bagaimana cara komunikasi atas kepada bawahan karena komunikasi ini bersifat hierarki dan perintah dari pimpinan yang perlu di dilaksanakan dengan baik. Komunikasi dalam proses diktukba ini dapat juga bersifat komunikasi ke samping atau saling berkoordinasi ataupun komunikasi dari bawah ke atas sebagai bentuk pelaporan atas penyelenggaraan diktukba kepada pimpinan sebagai bentuk evaluasi juga tentunya untuk penyelenggaraan yang lebih baik.

Peran Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Sangat Penting dalam Menunjang Keberhasilan Penyelenggaraan Diktukba Tahun 2021.

Aspek sumber daya manusia sudah baik dilihat dari kompetensi para gadik dan pengasuh dalam proses pembelajaran walaupun ada beberapa orang yang masih belum tersertifikasi. Sumber daya anggaran penyelenggaraan diktukba ini sudah cukup memadai dilihat dari pos pos anggaran yang sudah baik dan sesuai dengan standar pendidikan. Sumber daya peralatan baik dari sarana prasarana ataupun *alins alongins*-nya pun sudah cukup memadai untuk beberapa aspek, walaupun perlu adanya peningkatan jumlah agar proses penyelenggaraan diktukba lebih efektif. Sumber daya kewenangan pun berjalan sesuai dengan tugas jukrah (petunjuk pengarah) dari pimpinan sesuai dengan sprint (surat perintah) dari atasan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Peranan Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Diktukba Tahun 2021

Peranan disposisi ini penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan diktukba tahun 2021 ini. Proses pengangkatan birokrasi ini dilaksanakan melalui (surat perintah) yang ditandatangani atas untuk dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab seluruh personil. Disposisi ini dapat dilihat dari keterlaksanaan Standar Operasional Prosedur yang sudah dilaksanakan oleh SPN Polda Bali. Disposisi juga berkaitan dengan insentif yang diberikan, karena pemberian insentif ini adalah sebuah tugas yang memang dilaksanakan sesuai dengan SOTK maka insentif yang diberikan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan pembentukan.

Peran struktur birokrasi sangat penting dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan diktukba. Struktur birokrasi ini dapat dilihat dari kesiapan pelaksanaan latihan kerja yang diadakan di Polres/Polsek. Peranan ini berjalan memadai karena kesiapan seluruh pihak memadai untuk menyukseskan penyelenggaraan diktukba ini.

Implementasi penyelenggaraan Diktukba tahun 2021 di SPN Polda Bali

Implementasi penyelenggaraan Diktukba tahun 2021 di SPN Polda Bali dapat dilihat dari pemenuhan standar pendidikan, tingkat kepuasan dan beberapa hambatan yang menjadi aspek penting dalam proses pelaksanaan diktukba. Dilihat dari pemenuhan standar pendidikan Lemdiklat Polri, Diktukba Polri yang dilaksanakan di SPN Polda Bali pada tahun 2021 mayoritas sudah memenuhi ketercapaian standar pendidikan. Hasil tersebut ditampilkan pada **Gambar 1** berikut ini.



Gambar 1. Ketercapaian Standar Pendidikan Diktukba Tahun 2021

Dari hasil grafik **Gambar 1** tersebut, bahwa ketercapaian seluruh standar pada penyelenggaraan diktukba tahun 2021 di atas 90 persen. Hal ini terbukti bahwa dalam prosesnya, aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi dan aspek birokrasi dalam diselenggarakan dengan baik dan dicapai dengan kualitas yang memenuhi standar. Jika hasil tersebut diinterpretasikan menggunakan skala, maka nilai di atas 90% adalah nilai yang sangat baik. Maka dari itu dapat diinterpretasikan bahwa ketercapaian standar pendidikan nasional sudah sesuai dengan Perkap 14 Tahun 2015, meskipun ada beberapa sedikit kendala yang dirasakan ketika SPN Polda Bali menyelenggarakan proses pendidikan.

Maka dari itu, proses pendidikan harus dilakukan evaluasi, pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Bab 8 sampai 11 yang mengarah pada proses perbaikan kedepan, sehingga proses pendidikan berjalan secara berkesinambungan untuk mendapatkan *feedback* yang berkualitas dari penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan ini penting dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Lemdikpol sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan pengawasan dan pengendalian pada pasal 62, 63 dan 64 pada Perkap 14 Tahun 2015. Proses tersebut adalah monitoring, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Proses ini akan penting ketika hasil-hasil pemenuhan standar dan kepuasan peserta didik ditindaklanjuti kelemahan-kelemahannya sehingga Lemdikpol dan seluruh jajaran dapat mendapatkan informasi untuk perkembangan sistem pendidikan yang lebih baik lagi. Di bawah ini adalah tingkat kepuasan serdik dalam proses penyelenggaraan Diktukba tahun 2021 yang dirangkum dalam **Gambar 2** diagram lingkaran berikut.



Gambar 2. Kepuasan Serdik Diktukba Tahun 2022

Dari **Gambar 2** diagram lingkaran Persentase Kepuasan Serdik atas keseluruhan layanan SPN Polda Bali pada penyelenggaraan Diktukba Polri T.A. 2021 menunjukkan persentase sebesar 98% sudah puas, sedangkan 2% nya masih menunjukkan belum puas dalam layanan di SPN Polda Bali. Kepuasan serdik ini berkaitan dengan jenis layanan pengelola, fasilitas yang ada di SPN Polda Bali, kurikulum pendidikan, tenaga pendidik (gadi) serta pengasuh, serta lingkungan yang mendukung penyelenggaraan Diktukba.

Implikasi dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa teori yang dikemukakan George Edward III mengenai implementasi kebijakan yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi relevan pada penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri tahun 2021. Implementasi kebijakan tersebut sudah sesuai dengan proses sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan yang dibuat oleh Lemdiklat Polri. Hal tersebut meyakinkan bahwa proses implementasi kebijakan Diktukba Polri di SPN Polda Bali sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan sistem pendidikan yang berpedoman pada teori George Edward III menambah referensi bahwa aturan kebijakan Perkap 14 sudah berjalan dengan maksimal dan menguatkan aturan dan pasal-pasal di dalamnya efektif dijalankan oleh SPN Polda Bali sebagai operasional level hierarki kebijakan. Aspek-aspek Perkap 14 yang ditunjang oleh peran komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pendidikan bintara SPN Polda Bali dilihat dari segi teoritis kebijakan dan aturan kebijakan yang melekat dan mempunyai nilai yang bermanfaat bagi institusi Polri untuk mengembangkan proses pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. Y. N. (2016). Implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat pada kepolisian resort (POLRES) Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(1), 16-25.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Anwar, A. R. H. (2017). Pendidikan pembentukan Bintara Polri dalam menyiapkan lulusan yang profesional. *SOSIOHUMANITAS*, 19(1), 1-27.
- Blumberg, D. M., Schlosser, M. D., Papazoglou, K., Creighton, S., & Kaye, C. C. (2019). New directions in police academy training: A call to action. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(24), 4941-4955.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan menggunakan model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67-78.
- Noor, M., & Sulistiyono, P. S. (2016). Implementasi kebijakan reformasi birokrasi bidang Aparatur Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 20-23.
- Rahawarin, M. A. (2019). Implementasi kebijakan pelayanan publik di Kantor Camat Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur. *Badati*, 1(1), 1-24.
- Roring, A. D., Mantiri, M., & Lapian, M. T. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona (covid 19) di desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal GOVERNANCE*, 1(2), 1-11.
- Sudrajat, T. (2014). Implementasi kebijakan pemberdayaan dosen dan profesionalitas birokrasi perguruan tinggi swasta. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 11(2), 310-323.
- Tisngati, U., Martini, M., & Iriani, S. (2016). Implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup di PKBM berdasarkan model grindle. *Jurnal Humaniora*, 3(02), 377-382.

- Wardana, Y. (2021). Implementasi kebijakan lalu lintas berbasis elektronik sebagai penegakan hukum di era digital. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-17.
- Winantasari, D., & Rahaju, T. (2019). Implementasi program sim samsat terminal (+) Kertajaya Mojokerto Satlantas Polres Mojokerto Kota (studi pada pelayanan perpanjangan masa berlaku SIM). *Publika*, 7(3), 33-42.